



Penanganan Kawasan Kumuh Yogya

■ Yulianingsih

Kawasan kumuh terdapat di 13 dari 14 kecamatan yang ada di Kota Yogyakarta.

YOGYAKARTA — Sebagai ibu kota pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Kota Yogyakarta memang menjadi magnet tersendiri bagi banyak pihak untuk mengadu nasib di kota kecil ini. Sebagai dampaknya, jumlah penduduk di Kota Yogyakarta dari tahun ke tahun terus bertambah, begitu juga tempat hunian.

Bahkan, di beberapa wilayah yang seharusnya tidak diperbolehkan untuk lokasi hunian, akhirnya digunakan juga untuk tempat tinggal. Karena itulah muncul beberapa kawasan tak layak huni di beberapa titik di Kota Yogyakarta atau biasa disebut sebagai kawasan kumuh. Menurut Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Yogyakarta Edy Muhammad, sebuah kawasan dikatakan tidak layak huni

atau kumuh karena memenuhi beberapa kriteria. Antara lain, karena tidak adanya sarana dan prasarana umum yang memadai dan banyaknya rumah tak layak huni (RTLH) di kawasan tersebut.

Edy mengatakan, penanganan kawasan kumuh di Kota Yogyakarta ini berjalan sesuai dengan perintah pusat yang mengeluarkan program 100 : 0 : 100. Menurut dia, program tersebut dicanangkan pemerintah secara resmi pada Hari Habitat Nasional awal November lalu. Program tersebut menargetkan adanya pelayanan 100 persen untuk penyediaan air bersih bagi masyarakat, 0 persen kawasan kumuh, dan 100 persen pelayanan sanitasi terpadu bagi masyarakat. "Terkait hal itu, kita telah melakukan pendataan secara rinci terhadap kawasan kumuh maupun RTLH sebagai sasaran penanganan dalam program tersebut," ujar dia saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa (18/11).

Pendataan tersebut, menurut Edy, melibatkan perguruan tinggi, dalam hal ini Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta. Pendataan sendiri telah dilakukan bulan lalu dan akan menjadi acuan

atau dasar pada pembangunan kawasan kumuh dan RTLH di Kota Yogyakarta. "Penanganan kawasan ini tidak hanya dilakukan oleh Pemkot Yogyakarta semata, tetapi juga melibatkan banyak pihak, termasuk Pemda DIY, pemerintah pusat, peran swasta, dan masyarakat sendiri," ujar dia.

Kepala Subbidang Pengumpul dan Pengolah Data Bappeda Kota Yogyakarta Sumitro mengatakan, tim pendataan dari UGM terjun langsung ke lapangan dengan berbagai kriteria pengukuran untuk melihat luasan kawasan kumuh dan banyaknya RTLH di Kota Yogyakarta. Dari hasil pendataan tersebut, ia mengatakan, kawasan tak layak huni atau kawasan kumuh itu terdapat di 13 dari 14 kecamatan yang ada di Kota Yogyakarta. "Hanya satu kecamatan yang tidak memiliki kawasan kumuh, yaitu Kecamatan Keraton," kata dia.

Sedangkan 13 kecamatan lainnya, menurut Sumitro, memiliki kawasan kumuh dengan luasan yang bervariasi. Luas kawasan kumuh berdasarkan hasil pendataan itu mencapai 278,70 hektare atau 8 persen dari luasan seluruh wilayah Kota Yogyakarta yang mencapai 32,5 kilometer

persegi. "Secara persentase memang kecil. Namun hal ini tetap menjadi fokus penataan kawasan dan pembangunan di Kota Yogyakarta," ujar dia.

Sebagian besar kawasan kumuh di Kota Yogyakarta ini, menurut Sumitro, berada di wilayah bantaran sungai. Terutama di bantaran Kali Code, Gajah Wong, Winongo, dan Bunting. Konsentrasi kawasan kumuh yang paling luas terdapat di Kecamatan Umbulharjo yang mencapai 85 hektare, disusul Kecamatan Tegalrejo seluas 28,61 hektare, dan Kecamatan Gondomanan seluas 25 hektare. Hasil pendataan UGM ini telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Wali Kota Nomor 393/2014. Surat keputusan itu dijadikan landasan untuk penanganan kawasan tersebut oleh semua pihak, terutama satuan kerja perangkat daerah (SKPD) terkait di Pemkot Yogyakarta. Berdasarkan pendataan itu juga Pemkot Yogyakarta memiliki data secara rinci terkait jumlah RTLH.

Berdasarkan data tersebut, jumlah RTLH di Kota Yogyakarta sebanyak 3.343 rumah atau tiga persen dari jumlah bangunan yang ada di kota ini sebanyak 92.965 bangunan. Dari sisi persentase, menurut Sumitro, memang kecil, tetapi merata di 14 kecamatan di Kota Yogyakarta. RTLH terbanyak terdapat di Kecamatan Mergangsan sebanyak 710 rumah. Kemudian Kecamatan Tegalrejo sebanyak 440 rumah, Kecamatan Danurejan sebanyak 401 rumah, Kecamatan Kotagede 252 rumah, serta Kecamatan Umbulharjo 246 rumah. "Dari sisi kawasan, Kecamatan Umbulharjo memiliki kawasan kumuh terluas. Namun dari sisi RTLH jumlahnya tidak terlalu banyak," ujar dia.

Sumitro mengatakan, data RTLH itu terbagi dalam kluster rendah, sedang, dan tinggi. Pembagian itu dilakukan, menurut dia, untuk intervensi program agar lebih tepat sasaran. Ia mengatakan, data RTLH itu juga telah disediakan secara *by name* dan *by address*. Dengan begitu, menurut dia, sasaran program penanganan akan lebih mengena.

Kerja gotong royong

Selain dikoordinasikan dengan SKPD terkait, menurut Kepala Bidang Pengendalian Evaluasi dan Pelaporan Bappeda Kota Yogyakarta Wahyu Handoyo, penanganan kawasan kumuh dan RTLH di Kota Yogyakarta juga melibatkan peran swasta dan masyarakat di wilayah kumuh itu sendiri. "Penanganan kawasan ini kita lakukan secara gotong royong,"

ujar dia.

Wahyu mengatakan, pada dasarnya Pemkot Yogyakarta hanya memberikan stimulan agar masyarakat di kawasan itu mandiri dan bisa bersama-sama melakukan pembangunan untuk pengentasan kawasan dari status tak layak huni. Selama ini, menurut dia, Pemkot sudah memfasilitasi terbentuknya forum masyarakat di tiga bantaran sungai di Kota Yogyakarta. Forum inilah yang dijadikan motor penggerak agar kawasan bantaran sungai di Kota Yogyakarta terbebas dari RTLH. Ada tiga komunitas kawasan bantaran sungai yang terbentuk, yaitu Forum Silaturahmi Masyarakat di Bantaran Sungai Gajah Wong (Forsides), Paguyuban Masyarakat Bantaran Kali Code (Femerti Code), dan Forum Komunikasi Kawasan Kali Winongo (FKWA). Melalui forum masyarakat tersebut, Wahyu mengatakan, Pemkot memberikan stimulasi berupa pelatihan pembentukan program dan dana.

Menurut Wahyu, tahap awal yang dilakukan untuk pengentasan kawasan kumuh bantaran sungai ini adalah dengan melakukan revitalisasi bantaran sungai. Masyarakat melalui forum tersebut membuat program revitalisasi kawasan bantaran sungai yang kemudian diajukan ke Pemkot Yogyakarta. Pemkot setempat melalui SKPD terkait memberikan stimulan dana dan pendampingan atas program yang diusulkan. Wahyu mengatakan, sudah ada beberapa program, antara lain pembangunan ruang terbuka hijau (RTH) di bantaran sungai dan pembangunan sarana serta prasarana lainnya.

Melalui pembangunan itu, akses masuk ke kawasan bantaran sungai menjadi lebih mudah, tertata, dan rapi. Kawasan bantaran sungai di Yogyakarta justru menjadi ikon baru titik wisata di Kota Yogyakarta. Hal ini lantaran penataan kawasan yang dilakukan masyarakat melalui forum-forum tersebut. Bahkan, menurut Wahyu, forum itu juga membuat titik-titik wisata sungai di kawasan tersebut.

Wahyu mengatakan, program tersebut bahkan telah dilirik pemerintah pusat dan Bank Dunia. Menurut dia, mereka ikut dalam menstimulasi pembangunan kawasan bantaran sungai. Begitu pun, menurut dia, dengan pihak swasta melalui program *corporate social responsibility* (CSR). "Semua pihak ini kita gandeng bersama untuk melakukan penataan kawasan kumuh di Kota Yogyakarta dan masyarakat justru sebagai *leader*-nya," kata dia.

■ ed: irfan fitrat

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Badan Perencanaan Pembangunan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 28 Mei 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005